

**SKRIPSI**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN LESTARI TAHUN 2022**

Disusun Oleh :

Nama : Mia Permatasari

NPM : 2132321118

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

NAMA : Mia Permatasari  
NPM : 2132321118  
JURUSAN : Administrasi Bisnis  
PROGRAM STUDI : Administrasi Bisnis Sektor Publik  
JUDUL : Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap  
Kualitas Laporan Keuangan Pada Direktorat  
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 9 November 2023

Pembimbing



**(Heny Handayani, S.Hum, M.M.)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 14 November 2023.

Ketua Merangkap Anggota,  
  


(Titin Sri Murtinah, SE, M.M.)

Sekretaris Merangkap Anggota,



(Karnida Retta G, SE, M.M.)

Anggota,



(Heny Handayani, S.Hum, M.M.)

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mia Permatasari**  
NPM : **2132321118**  
Jurusan : **Administrasi Bisnis**  
Program Studi : **Administrasi Bisnis Sektor Publik**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan Judul **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022”** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 14 November 2023

Penulis,



Mia Permatasari

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022” ini tepat pada waktunya. skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana terapan pada program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Ibu Heny Handayani, S.Hum., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Nurmita, SE., M.M selaku dosen pendamping yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Politeknik STIA – LAN Jakarta yang telah memberikan ilmunya serta bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.

5. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala kasih sayang serta doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan mewujudkan cita – cita.
6. Kakak – kakak tercinta yang selalu mendukung penulis dan menghibur ketika penulis sedang membutuhkan semangat.
7. Rekan kerja dan teman – teman Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan kerja dan teman-teman mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan perbaikan karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terkahir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, November 2023

Penulis

MP

## Abstract

*This research aims to find out how internal control influences the quality of financial reports at the Directorate General of Sustainable Forest Management in 2022. In this research, primary data was used in the form of distributing questionnaires to financial staff respondents in the Administration Subdivision of each work unit. The research results show that, based on the results of the coefficient of analysis ( $R^2$ ) test, the adjusted R Square is 0.106, which means that 10.6% of the internal audit variables are able to assess the quality of financial reports. From the results of the hypothesis test, it was found that the internal significance variable had a coefficient of 2.383 and significance ( $0.021$ )  $< 0.05$  and a value of 2.001 or the calculated  $t$  value was greater than the  $t$  table ( $2.239 > 2.001$ ), so the hypothesis was accepted. This means that there is a positive and significant influence of the internal control system on the quality of financial reports. This can be interpreted as meaning that the internal control system can improve the quality of financial reports at the Directorate General of Sustainable Forest Management.*

**Keywords:** *Internal Control; Quality; Financial Reports*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022. Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner dengan responden staf keuangan pada Subbagian Tata Usaha masing – masing unit kerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Berdasarkan hasil uji koefisien determenasi ( $R^2$ ) tersebut didapat *adjusted R Square* adalah 0,106 yang berarti sebesar 10,6 % variable independen pengendalian Internal mampu menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan. Dari hasil uji hipotesis diperoleh variabel pengendalian internal mempunyai koefisien 2,383 dan signifikansi ( $0,021$ )  $< 0,05$  dan nilai 2,001 atau nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,239 > 2,001$ ), maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

**Kata Kunci :** Pengendalian Internal; Kualitas; Laporan Keuangan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Teori.....	11
B. Definisi Operasional Variabel dan Indkatornya.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	30
D. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian.....	32
B. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	38
E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Penyajian Data.....	51
B. Pembahasan.....	58
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	65

BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSATAKA.....	vii
LAMPIRAN.....	viii



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
Tabel 1.1 Hasil pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	5
Tabel 1.2 Persentase Pemantauan Pengendalian Internal.....	8
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Jumlah Responden Direktorat Jenderal PHL.....	35
Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Variabel Skala Likert.....	39
Tabel 3.3 Kisi – Kisi Pertanyaan Variabel Pengendalian Internal.....	39
Tabel 3.4 Kisi – Kisi Pertanyaan variabel Laporan Keuangan.....	40
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 3.6 Hasil Uji Reabilitas Variabel X.....	44
Tabel 3.7 Hasil Uji Reabilitas Variabel Y.....	45
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Karakteristik Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Karakteristik Jabatan.....	59
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Karakteristik Pendidikan.....	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov – Smirnov.....	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastitas.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolenaritas.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Linearitas.....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial (uji T).....	66
Tabel 4.10 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana.....	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determenasi.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
Gambar 2.1 Analisis Risiko dalam Proses Manajemen Risiko.....	14
Gambar 2.2 Unsur – Unsur Pengendalian Internal.....	17
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	54
Gambar 4.3 Lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).....	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Ditjen PHL.....	57
Gambar 4.4 Grafik Plot.....	62

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada instansi pemerintah merupakan salah satu cara dalam menghadapi isu pengelolaan administrasi publik. Tata kelola yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang kurang memuaskan pada Masyarakat menjadi isu yang sedang mengemuka. Peran pemerintah yang dominan dalam penyelenggaraan negara dengan menggunakan pola – pola lama menjadi tidak relevan dengan tatanan masyarakat. Keadaan ini, menjadikan masyarakat seperti merasa terabaikan dan kepercayaanya disalahgunakan ketika masalah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan ekonomi pemerintah terjadi.

Pembaharuan dan perubahan pada sistem penyelenggaraan negara diperlukan dalam membantu tercapainya tata manajemen yang baik dan mewujudkan kepuasan publik. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dalam aspek – aspek organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada organisasi. Hal ini memiliki tujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana dalam mencapai tatanan administrasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis perlu dilakukan pengendalian internal pada masing – masing unit organisasi di instansi publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan yang selanjutnya di singkat (SPIP) adalah sistem pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2010:251) sistem pengendalian internal merupakan sistem integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan manajemen dan jajarannya dalam memberikan jaminan dan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan sesuai undang – undang.

Salah Satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam melaporkan aktivitas keuangannya kepada publik/masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus sangat berkualitas. Kriteria dan faktor yang menentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum adalah salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Penyusunan laporan keuangan secara umum menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang digunakan oleh pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Demi menjaga keandalan laporan keuangan pemerintah terhadap Lembaga negara yang memeriksa hal tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil laporan pemeriksaan ini disajikan dengan predikat yang dikeluarkan oleh auditor untuk laporan keuangan masing – masing instansi pemerintah yang telah diperiksa. Predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang artinya dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai dalam hal material dan sesuai dengan prinsip berlaku. Menurut Surastiani & Handayani (2015) menjelaskan jika informasi keuangan yang dibuat harus memenuhi kebutuhan para pemakai dengan menyajikan informasi akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 adalah apabila informasi – informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan manajemen melalui evaluasi yang dilakukan pada peristiwa masa lalu dan masa kini serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Laporan keuangan juga harus bebas dari pengertian yang tidak benar, menyajikan data sesuai fakta dan dapat diverifikasi. Perbandingan laporan keuangan dari periode sebelumnya akan memberikan manfaat bagi organisasi dalam pelaksanaan anggaran.

Salah satu ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh instansi adalah prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan. Proses – proses yang harus dilakukan sesuai prinsip dimulai dari penyusunan standar, penyelenggaraan akuntansi serta penyajian laporan keuangan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip penyajian wajar.

Berkurangnya penyimpangan yang terwujud dalam laporan keuangan berkaitan dengan pengendalian internal dalam perencanaan serta pelaksanaan

pengelolaan keuangan. Penganggaran yang berbasis kinerja akan menginformasikan suatu program atau kegiatan yang memiliki dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Pemerintah sendiri memiliki tanggungjawab dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan regulasi yang ada. Pengukuran kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari keandalan laporan keuangan yang dibuat.

COSO adalah organisasi yang dikenal dengan COSO *Internal Control - Integrated Framework*. Mereka mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang masuk akal mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan informasi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Seorang sosiolog dan kriminolog terkenal, Cressey mengembangkan teori "*Iron Triangle*" yang menggambarkan bahwa kecurangan terjadi ketika ada tekanan finansial, peluang, dan rasionalisasi. Sehingga dapat disimpulkan pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, melindungi asetnya, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengendalian internal sangat penting untuk mengelola risiko, menjaga integritas operasional, dan memastikan akuntabilitas dalam organisasi.

Pengendalian internal atas laporan keuangan diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang timbul akibat pengawasan dan pengendalian yang buruk serta untuk menghasilkan data tentang laporan keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian internal harus dirancang dalam meminimalkan peluang kecurangan dan mengidentifikasi tanda-tanda peringatan yang mungkin mengindikasikan penipuan.

Salah satu fungsi sistem pengendalian internal adalah memberikan arahan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem pengendalian pemerintah berfungsi. Kebijakan dan prosedur pengendalian internal juga diperlukan untuk mencapai tujuan dan menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Hal ini juga diperlukan

untuk memastikan bahwa peraturan dan hukum yang berlaku dipatuhi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat mempercayai laporan keuangan jika sistem pengendalian pemerintahan lemah atau kurang. (Nurillah dan Muid, 2014).

Dihimpun dari website resmi BPK RI menginformasikan bahwa pada tahun 2022 lembaga tersebut telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil pemeriksaan dari 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta Laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa seluruh instansi pemerintah berusaha mewujudkan laporan keuangan yang andal kepada masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI selama 5 tahun terakhir. Selain memberikan rekomendasi tambahan, BPK memberikan opini tertentu sebagai cara untuk mengapresiasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2022. Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode Tahun 2018 – 2022**

No	Periode Laporan keuangan	Opini BPK RI
1	2018	WTP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

Sumber : website resmi BPK RI (<https://www.bpk.go.id/>)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri memiliki 13 Eselon 1 dalam mendukung tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selanjutnya disingkat Ditjen PHL mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari selaku pemberi layanan juga mendukung kelancaran proses agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepuasan publik dapat dicapai.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari bertanggung jawab dalam penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada publik yang akuntabel, andal dan transparan. Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 232/PMK.05/2022 tgl.30-12-2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari juga melaksanakan prosedur dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal dalam upaya mengelola resiko yang ada pada

kegiatan – kegiatan organisasi dalam mendukung pencapaian rencana strategis (Renstra) tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 38 Tahun 2015 untuk dapat mencapai tujuan dimaksud, Eselon I sebagai bagian dari kementerian yang memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan (regulator), pada setiap awal tahun merancang dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit pelaksanaannya di daerah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan (operator). Dukungan pengendalian internal yang baik tentu saja akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam mewujudkan penilaian laporan keuangan yang andal. BPK RI aktif dalam melaksanakan audit kepatuhan secara periodik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pemberian opini WTP nyatanya masih terdapat temuan – temuan yang berulang yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti. Sesuai data catatan laporan hasil pemeriksaan laporan kementerian, pengelolaan persediaan dan aset tahun 2022 masih menjadi temuan berulang seperti tahun 2021. Penerimaan negara bukan pajak karbon dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan menjadi catatan BPK RI untuk ditindaklanjuti pada laporan keuangan tahun 2022.

Fenomena yang terjadi yang lain terkait penyampaian laporan keuangan masih belum disampaikan secara tepat waktu. Penyampaian yang tidak tepat waktu ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan – kegiatan pelaporan yang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa penyampaian tersebut merupakan kewajiban organisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance*.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari bahwa terdapat perubahan nomenklatur Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL).

Perubahan nomenklatur baru yang telah dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada tahun 2021 dan 2022 dengan mengubah struktur organisasi secara signifikan baik instansi pusat dan daerah juga memiliki dampak tersendiri dalam pelaksanaan organisasi khususnya pada pengendalian internal. Penghapusan pejabat Eselon IV dan pengalihan jabatan menjadi pejabat fungsional tentunya menghadirkan banyak resiko baru dalam pelaksanaan kegiatan dan berujung pada pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2015 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengendalian Internal kepala satuan kerja memiliki tanggung jawab dalam penyusunan desain penyelenggaraan SPIP sampai dengan pemantauan. Jika pada nomenklatur Ditjen PHL sebelumnya, tugas pengawasan pengendalian internal berada pada bagian evaluasi, untuk saat ini beralih menjadi tugas dan fungsi bagian sub bagian tata usaha. Hal ini memberikan dampak terhadap pemantauan – pemantauan risiko yang dilakukan pada setiap triwulan pada tahun 2022 menjadi tidak tertib. Jika dilihat pada aplikasi SIMAWAS Itjen pada triwulan ke 4 tahun 2022, masih ada 9,5% dari seluruh satker lingkup Ditjen PHL yang belum menyelesaikan pemantauan terhadap risiko – risiko yang signifikan. Pemantauan yang tidak berkelanjutan ini tentunya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi sehingga menjadi tidak efektif dan mempunyai pengaruh pada pelaporan – pelaporan kegiatan yang ada pada Ditjen PHL.

Tabel 1.2  
Persentase Pemantauan Pengendalian Internal

No	Triwulan	Jumlah					
		Proses		Selesai		Sisa	
1	I	0	0.0%	18	94.7%	1	5.3%
2	II	1	4.8%	20	95.2%	0	0.0%
3	III	2	9.1%	19	86.4%	1	4.5%
4	IV/Tahunan	2	9.5%	17	81.0%	2	9.5%

\*\* Data pemantauan kebijakan pengendalian signifikan

Sumber : Aplikasi Simawas (<https://simawas.itjen.menlhk.go.id/>)

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022”**.

#### B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022?”

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain mengenai sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah serta dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Sistem Pengendalian Internal yang ada di Instansi sehingga dapat membantu dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian internal dalam Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### 3. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**